



Warga Jakarta Dukung Upaya Pemprov DKI Atasi Polusi Udara

JAKARTA – Masyarakat mendukung aksi nyata Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi polusi udara yang diharapkan dapat dijalankan secara konsisten. Mulai dari penanaman pohon, uji emisi kendaraan, kebijakan bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH) untuk mengurangi mobilitas Aparatur Sipil Negara (ASN)-nya, penegakan hukum berupa sanksi tegas kepada industri yang mencemari lingkungan, hingga penyemprotan *water mist* dari atas gedung-gedung pencakar langit.

Pengamat kebijakan publik dari GMT (Grahamandiri Manajemen Terpadu) Institute Agustinus Tamtama Putera menyatakan, upaya Pemprov DKI Jakarta tersebut harus didukung semua pihak untuk mengurangi polusi udara. "Sebagaimana saya tuliskan tentang terobosan menangani sisi ekologis Jakarta, akhir-akhir ini memang Heru Budi Hartono berupaya membuat kebijakan taktis dan praktis untuk menekan polusi Jakarta yang memprihatinkan semua orang," katanya, Jumat (1/9/2023).

Meski demikian, Tamtama menyadari, untuk membereskan udara Jakarta yang tercemar tidak bisa instan. Menurutnya, setiap orang memiliki andil untuk mengatasi pencemaran udara. "Ini sebuah gejala fenomenal, untuk mengatasinya perlu langkah-langkah strategis. Seperti sidak dan sanksi dari Pemprov DKI ke industri adalah hal yang bagus. Akan semakin bagus jika dilakukan secara masif, tidak hanya sekali dan terus dievaluasi," imbuhnya.

Tamtam mengakui, pelaku usaha memang harus berkegiatan demi perekonomian. Namun, mereka juga harus memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan warga. Ia pun menyadari, implementasinya tidaklah mudah, karena perlu dukungan semua pihak. Misalnya, dari akademisi yang mendukung kebijakan itu dengan kajian komprehensif, swasta dan warga yang mematuhi aturan, serta pemerintah yang wajib tegas dalam mengawasi dan inovatif

membuat kebijakan.

Lebih Masif dan Intensif

Salah seorang warga yang terdampak polusi udara, Cecep Supriadi (49), terus mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk gencar melakukan pengawasan secara intensif. Penghuni Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara, ini mengungkapkan, para penghuni rusun seperti dirinya mendukung penindakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, berupa penghentian operasional dua perusahaan yang diduga mencemari udara di sekitar tempat tinggal mereka.

"Untuk saat ini kondisinya sudah agak mendingan dan kami cek di lokasi itu sudah agak berkurang kegiatannya," ujarnya.

Menurut Cecep, warga sudah melaporkan persoalan ini kepada pemerintah daerah sejak beberapa waktu lalu. Tak lama setelah melapor, Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meninjau ke lokasi.

"Sebagai warga tentu mendukung yang dilakukan oleh pemerintah. Laporan cepat ditindaklanjuti. Saat ke lokasi, kualitas udara dicek dan kondisi kesehatan warga sekitar juga dicek. Semoga perusahaan itu juga didorong untuk ada CSR (*Corporate Social Responsibility*) kepada warga sekitar dan sekolah di sini. Ada empat sekolah yang terdampak: SDN 05 Marunda, SMPN 290, TK, dan SDN 02 Marunda," tuturnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengajak semua pihak, baik instansi pemerintah, swasta, komunitas, maupun warga untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.

"Bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami melakukan penegakan hukum atau mengingatkan kembali kepada industri yang diduga melampaui batas emisi yang ditetapkan," ucapnya saat menjadi *keynote speaker* dalam diskusi publik bertajuk "*Quick Response* Penanganan Kualitas Udara di DKI Jakarta", Senin (28/8/2023).

Menurut Heru, pencemaran udara telah menjadi krisis yang tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga daerah-daerah di sekitarnya. Untuk itu, dibutuhkan sinergi antardaerah penyangga, seperti Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Tangerang, serta Kota Depok. (faf)